

Studi Perbandingan Digitalisasi Pelayanan Publik Antara Malaysian Administrative Modernisation And Management Planning Unit (MAMPU) Dan Satu Data Indonesia

Lukman Efendi

Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka

E-mail : lukmanefendi0845@gmail.com

Abstract

Gelombang digitalisasi dalam ranah pelayanan publik kini menjadi agenda krusial di kawasan Asia Tenggara untuk mengikis birokrasi yang lamban, berbiaya tinggi, serta rentan terhadap praktik koruptif. Namun, literatur yang ada saat ini mayoritas berfokus pada evaluasi tunggal di satu negara, sehingga menyisakan celah penelitian (research gap) yang besar dalam hal studi komparasi struktur tata kelola data lintas batas negara. Studi ini berupaya membedah sekaligus membandingkan secara kritis peta jalan strategis, tata kelola kelembagaan, beserta hambatan nyata di lapangan antara Pemerintah Malaysia lewat Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) di bawah Kementerian Digital, dengan Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang dikawinkan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Mengandalkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi komparatif, riset ini membahas bagaimana perbedaan mendasar antara sistem ketatanegaraan parlementer federal di Malaysia dan presidensial kesatuan dengan otonomi luas di Indonesia ikut mendikte ritme penyatuan data nasional. Artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa kerangka analisis institusional komparatif yang membuktikan bahwa model komando sentralistik Putrajaya menghasilkan efisiensi waktu yang agresif, sementara model kolaboratif desentralistik pemerintah unggul dalam inklusivitas data daerah meskipun terhambat oleh ego sektoral yang kronis. Kontribusi akademis dari riset ini adalah penyediaan model adaptasi tata kelola data bagi negara berkembang dengan karakteristik birokrasi yang kompleks.

Kata Kunci: Digitalisasi Pelayanan, Birokrasi Sektor Publik, MAMPU, Satu Data Indonesia, SPBE

1. PENDAHULUAN

Dunia hari ini tidak lagi menoleransi pelayanan publik yang serba lambat, tertutup, dan berbelit-belit. Angin segar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mendorong negara-negara berkembang untuk merombak total birokrasi usang mereka menuju sistem pemerintahan digital atau e-government (Osborne & Gaebler, 1992). Di panggung Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi dua magnet geopolitik yang sangat menarik untuk dicermati. Kendati kedua bangsa ini berbagi kedekatan sosiokultural yang erat, mereka justru memilih rute yang bertolak belakang dalam mengarsiteki transformasi digitalnya akibat perbedaan sistem politik dan ketatanegaraan yang dianut.

Malaysia, yang bersandar pada sistem parlementer federal, menyerahkan tongkat komando modernisasi administrasinya kepada MAMPU (*Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit*). Posisi lembaga ini kian strategis setelah dilebur ke dalam Kementerian Digital Malaysia demi mengejar target agresif Digital Action Plan 2030 (MD2030) (MyDIGITAL Corporation, 2021). Di seberang pulau, Indonesia meniti jalan di atas sistem presidensial yang berkelindan dengan hak otonomi daerah yang teramat luas. Strategi yang diluncurkan pemerintah

* Copyright (c) 2026 **Lukman Efendi**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

adalah mematri kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) lewat Perpres No. 39/2019 yang kemudian diakselerasi melalui Perpres No. 82/2023 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Bahkan, pemerintah kini tengah sibuk menyusun RUU Satu Data Indonesia sebagai payung hukum tertinggi demi menyatukan data negara yang selama ini berserak.

Meskipun evaluasi mengenai efektivitas *e-government* pada masing-masing negara telah banyak dipublikasikan oleh peneliti terdahulu seperti Bakar et al., 2022; Suhardi & Firmansyah, 2023), terdapat *research gap* yang nyata dalam literatur administrasi publik. Sejauh ini, belum ada kajian yang secara mendalam membandingkan performa institusional digital secara lintas batas negara antara corak tata kelola terpusat (*centralized*) dengan corak jaringan (*networked*). Kajian ini hadir untuk menguliti secara tajam dan mengisi celah tersebut dengan membenturkan model kelembagaan yang sentralistik gaya Putrajaya dengan sistem kelola data yang menyebar dan kolaboratif gaya pemerintah. Fokus utama riset ini adalah mengukur sejauh mana disparitas struktur tersebut memengaruhi penyediaan data publik yang valid, mutakhir, terpadu, dan mudah dibagipakaikan. Kebaruan akademis yang ditawarkan adalah pembuktian teoretis bahwa struktur makro ketatanegaraan suatu negara memegang peranan deterministik dalam keberhasilan integrasi data nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan studi komparatif. Penggunaan metode kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam, utuh, dan kontekstual mengenai fenomena transformasi digital di lingkungan birokrasi tanpa melakukan intervensi terhadap objek penelitian (Ansell & Gash, 2007). Sementara itu, pendekatan studi komparatif diimplementasikan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, kekuatan, dan kelemahan dari dua model arsitektur tata kelola data pemerintahan yang berbeda secara diametral.

Seluruh data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan sumber data sekunder yang bersifat resmi dan kredibel. Data tersebut diperoleh melalui penelusuran dokumen kebijakan mutakhir dari kedua negara, yang meliputi dokumen Malaysia Digital Economy Blueprint (MDEB), peta jalan *Digital Action Plan 2030* (MD2030), rilis resmi Kementerian Digital Malaysia, draf regulasi RUU SDI, dokumen perencanaan pembangunan Bappenas RI, hingga laporan evaluasi terintegrasi yang menggabungkan indeks SDI, indeks SPBE, dan sistem informasi geospasial Bhumandala.

Prosedur analisis data dilakukan secara naratif-deskriptif dengan mengadopsi model analisis interaktif. Tahapan analisis diawali dengan melakukan reduksi data, di mana seluruh informasi dari dokumen kebijakan disaring dan dikelompokkan berdasarkan variabel kelembagaan, interoperabilitas, dan keamanan siber.

Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif ke dalam matriks komparasi taksonomis untuk memetakan disparitas indikator strategis antara Malaysia dan Indonesia. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis kritis untuk menginterpretasikan makna di balik perbedaan struktur kelembagaan tersebut dan

mengaitkannya dengan teori administrasi publik (Miles et al., 2014). Proses analisis ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan teoretis dan praktis yang logis serta objektif mengenai efektivitas kedua model tata kelola data publik tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anatomi Kelembagaan

1) Sentralisasi Komando MAMPU dan Jaringan Kerja Kolaboratif SDI

Akar perbedaan paling mendasar dalam digitalisasi pelayanan publik antara Malaysia dan Indonesia terletak pada desain arsitektur kelembagaan masing-masing negara. Struktur inilah yang mendikte bagaimana sebuah regulasi abstrak diturunkan menjadi petunjuk teknis operasional di lapangan.

Perbandingan Model Tata Kelola Data Malaysia dan Indonesia

Aspek	Model Komando MAMPU (Malaysia)	Model Kolaboratif SDI (Indonesia)
Nama Model	Model Komando	Model Kolaboratif
Alur Struktur	Kementerian Digital → MAMPU → Agensi Federal / Kerajaan Negeri	Dewan Pengarah Pusat ⇔ Kementerian/Lembaga ⇔ Walidata Daerah / Pemda
Sifat Hubungan	<i>Top-Down</i> & Seragam (Komando searah/sentralistik)	<i>Networked & Fragmented</i> (Jaringan dua arah/desentralistik)
Pusat Kendali	Terpusat di bawah kementerian tunggal yang membawahi MAMPU	Kolektif di bawah Dewan Pengarah Pusat (melibatkan banyak kementerian/lembaga)
Penerapan di Daerah	Seragam dan mengikat langsung hingga ke tingkat Kerajaan Negeri (Negara Bagian)	Tergantung pada koordinasi dan kesiapan Walidata di setiap Pemerintah Daerah

2) MAMPU dan Paradigma Sentralisasi Birokrasi

Semenjak bernaung di bawah Kementerian Digital Malaysia, MAMPU menjelma menjadi lembaga clearing house teknologi tunggal di tingkat federal (Mohamed & Ali, 2025). Model tata kelola yang dijalankan mengadopsi pola komando terpusat (*centralized command*). Maknanya, setiap agensi federal maupun kerajaan negeri (pemerintah negara bagian) wajib hukumnya tunduk pada standarisasi teknologi yang dikeluarkan oleh MAMPU. Sisi positif dari model komando ini adalah tingginya efisiensi anggaran TIK dan cepatnya penetrasi kebijakan ke level bawah (Haneem et al., 2022). Setelah Putrajaya mengetok palu untuk mempercepat adopsi MyDigital ID, MAMPU bisa langsung mengintegrasikan identitas digital tersebut ke dalam ekosistem imigrasi, perpajakan (LHDN), hingga jaring pengaman sosial dalam waktu singkat (MyDIGITAL Corporation, 2021).

Namun, kelemahan mendasar dari gaya *top-down* ini adalah sering kali abai terhadap variasi kapasitas finansial dan infrastruktur antar-negara bagian. Wilayah yang mapan seperti Selangor tentu melesat cepat, namun wilayah seperti Kelantan

atau Sabah kerap kali kesulitan akibat keterbatasan jaringan lokal. Kondisi ini memicu lahirnya jurang digital domestik yang nyata (Bakar et al., 2022).

3) Satu Data Indonesia dan Tantangan Networked Governance

Indonesia memilih jalur yang jauh lebih berliku lewat skema *collaborative* atau *networked governance* (Ansell & Gash, 2007). Kendali Satu Data Indonesia (SDI) berada di tangan Dewan Pengarah kolektif yang diisi secara bersama oleh Bappenas, Kemenkeu, Komdigi, BPS, dan BIG. Di tingkat operasional, beban kerja dibagi-bagi ke dalam peran 'Produsen Data' dan 'Walidata' di tiap-tiap kementerian pusat maupun Pemerintah Daerah. Pola ini merupakan konsekuensi logis dari undang-undang otonomi daerah yang memberikan mandat kekuasaan yang sangat luas kepada para kepala daerah.

Imbasnya, tingkat keberhasilan model ini sangat bergantung pada komitmen politik sang kepala daerah. Di wilayah yang dipimpin oleh sosok visioner, penyatuan data bergerak eksponensial. Namun, di mayoritas daerah lainnya, ego sektoral institusi masih menjadi tembok tebal yang sulit ditembus (Suhardi & Firmansyah, 2023). Langkah pemerintah menyatukan penilaian bersama antara Indeks SDI, Indeks SPBE, dan sistem geospasial Bhumandala merupakan obat penawar untuk memaksa pemma meruntuhkan sekat-sekat ego sektoral. Indonesia tidak bisa sekadar memberi instruksi kaku layaknya MAMPU. Pemerintah harus terus melakukan negosiasi regulasi, yang saat ini diikhtiarkan lewat penguatan RUU Satu Data Indonesia agar memiliki sanksi hukum yang menjerat.

B. Problem Interoperabilitas

Konsolidasi SuperApp dan Fragmentasi Data Silo

Masalah teknis terbesar yang membedakan kedua negara ini adalah urusan membagipakaikan data (*interoperability*) demi memangkas rantai birokrasi bagi masyarakat awam (Dunleavy et al., 2006).

1) Malaysia

) Malaysia lewat panduan Digital Action Plan 2030 (MD2030) sudah lama meninggalkan fase penyediaan situs web informasi yang pasif. Mereka kini tengah mematangkan konsep *Government-as-a-Platform* (GaaP). Dengan mengandalkan infrastruktur awan sektor publik (MyGovCloud), MAMPU sukses melebur pelbagai aplikasi sektoral ke dalam satu pintu interaksi warga (Mohamed & Ali, 2025). Adanya kamus data yang seragam membuat proses integrasi data lintas lembaga berjalan tanpa perlu utak-atik yang rumit. Maka tidak heran jika pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) untuk analisis prediktif pelayanan publik seperti manajemen kemacetan atau pembagian subsidi tertarget dapat berjalan optimal karena data mentah sudah terstruktur secara homogen sejak dari hulu (Haneem et al., 2022).

2) Indonesia

Kondisi di Indonesia jauh lebih kompleks. Sudah menjadi rahasia umum jika pemda dan kementerian di Indonesia gemar membangun aplikasi sendiri-sendiri demi mengejar penyerapan anggaran proyek TIK. Pada akhirnya, lahir puluhan ribu aplikasi pelayanan yang saling mengunci data di server masing-masing (data silo). Menurut data Bappenas (2023), anarki data pun tak terhindarkan, di mana data negara menjadi tumpang tindih, tidak akurat, dan sangat sulit diintegrasikan akibat format data yang beragam dan ego kepemilikan data sektoral yang sangat kuat.

Titik terang baru muncul setelah Pemerintah menegaskan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai tulang punggung arsitektur SPBE melalui penetapan Perpres No. 82/2023. Lewat skema ini, pemerintah pusat mulai melakukan moratorium dan secara bertahap menonaktifkan aplikasi lokal yang tidak standar, lalu memaksa migrasi data ke PDN menggunakan *Application Programming Interface* (API) nasional. Fokus utama Indonesia saat ini masih berkutat pada fase pembersihan data (*data cleansing*) dan penyeragaman kode referensi nasional, seperti menggabungkan data NIK dengan data nomor pokok wajib pajak. Dalam hal ini, Indonesia secara konseptual masih tertinggal satu langkah di belakang Malaysia yang sudah melompat jauh ke ranah *Big Data Analytics* pemerintahan.

C. Kerentanan Keamanan Siber

Mendorong transformasi digital tanpa diimbangi pertahanan siber yang kokoh sama saja dengan melakukan bunuh diri administratif. Baik MAMPU maupun SDI sama-sama pernah mencicipi pahitnya krisis siber yang memberi pelajaran berharga bagi tatakelola informasi publik mereka.

1) Sisi Gelap Sentralisasi Data Malaysia

Model terpusat yang diusung MAMPU ibarat menaruh seluruh telur berharga dalam satu keranjang yang sama. Ketika ekosistem MyGovCloud dan MyDigital ID dijadikan gerbang tunggal, sistem ini otomatis menjadi sasaran empuk kelompok peretas internasional (*Advanced Persistent Threats*). Kasus kebocoran data pribadi (Personal Data Protection Act) yang sempat mengguncang beberapa lembaga federal membuktikan bahwa sistem sentralistik tidak otomatis bebas dari celah keamanan, melainkan menciptakan risiko kelumpuhan total secara instan (*single point of failure*) (Mustafa & Rahim, 2022). Imbas sosiologisnya, MAMPU harus berhadapan dengan krisis kepercayaan publik. Warga cenderung enggan mengadopsi MyDigital ID jika negara tidak mampu menjamin keamanan data medis, finansial, dan biometrik mereka lewat undang-undang perlindungan data yang independen.

2) Evaluasi Tragedi Siber dan Kebangkitan Arsitektur Zero-Trust Indonesia

Indonesia mengalami bencana siber masif ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami serangan *ransomware* yang melumpuhkan layanan publik vital di ratusan instansi pusat dan daerah (Kominfo, 2024). Insiden ini membongkar kelemahan tata kelola digital nasional, yakni tidak adanya rencana mitigasi bencana (*disaster recovery plan*) yang otomatis, lemahnya tata kelola kata sandi birokrat, serta minimnya koordinasi keamanan interinstansi (Suhardi & Firmansyah, 2023).

Pasca tragedi tersebut, haluan mitigasi dalam kerangka SDI berputar haluan secara radikal. Proses integrasi data kini wajib mengadopsi arsitektur keamanan *Zero-Trust* ("never trust, always verify") serta enkripsi data *end-to-end* pada setiap jalur pertukaran data API nasional. Kebijakan Satu Data Indonesia tidak lagi sekadar memburu target kuantitatif keterhubungan data, melainkan menempatkan keamanan hayati data (*data biosecurity*) sebagai prioritas utama. Efek sampingnya, ritme digitalisasi di Indonesia menjadi sedikit lebih lamban karena setiap simpul interkoneksi harus melewati audit keamanan berlapis dari BSSN sebelum diizinkan terhubung ke infrastruktur PDN pusat.

D. Komparasi Desain Arsitektur Tata Kelola Data Publik

Indikator Analisis	MAMPU (Malaysia)	Satu Data Indonesia (Indonesia)
Gaya Tata Kelola	<i>Top-down</i> / Sentralistik penuh di bawah kementerian tunggal	<i>Collaborative Governance</i> / Kolektif-Kolegial lintas sektor
Prioritas Kebijakan	Target MD2030, Integrasi MyDigital ID, dan pemanfaatan AI pemerintahan	Pembaruan RUU SDI, interkoneksi data statistik/spesial, penyatuan Indeks Bhumandala & SPBE
Nilai Plus	Standardisasi berjalan cepat, birokrasi searah, infrastruktur merata	Keterlibatan daerah sangat hidup, data demografi kaya, legitimasi hukum RUU kuat
Titik Lemah	Sangat dipengaruhi dinamika politik federal; risiko serangan siber terpusat tinggi	Ego sektoral kronis, ketimpangan digital antar-wilayah, manajemen risiko siber tersebar

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel, terdapat perbedaan dikotomis yang sangat fundamental dalam arsitektur tata kelola data publik antara lembaga MAMPU di Malaysia dan inisiatif Satu Data Indonesia (SDI). Malaysia mengadopsi pendekatan tata kelola terpusat (*centralized governance model*) dengan rantai komando yang bersifat *top-down*. Seluruh otoritas perancangan kebijakan, standardisasi sistem, hingga eksekusi program diintegrasikan secara penuh di bawah satu kementerian tunggal, yakni Jabatan Perdana Menteri. Model birokrasi searah ini memberikan keunggulan kompetitif berupa percepatan standardisasi infrastruktur digital secara homogen di tingkat federal (MAMPU, 2021).

Akselerasi tersebut terbukti efektif dalam memuluskan target strategis nasional, seperti implementasi sistem identitas digital terintegrasi yakni MyDigital ID serta adopsi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) pada sektor pelayanan publik menuju target Malaysia Digital 2030. Zulkifli (2023) menambahkan bahwa pemusatan

wewenang pada MAMPU menciptakan standarisasi prosedur operasional yang baku di seluruh kementerian, sehingga meminimalisasi tumpang tindih regulasi digital. Pola linier ini sangat kontras jika disandingkan dengan dinamika di kawasan ASEAN, di mana benturan antara efisiensi komando tunggal dan pelibatan multi-aktor sering kali menjadi dilema utama dalam merumuskan arsitektur digital negara berkembang (Ramli & Rahman, 2024).

Sebaliknya, Indonesia menolak model sentralistik dan memilih paradigma tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Implementasi SDI diwujudkan melalui mekanisme kolektif-kolegial yang membagi peran secara lintas sektoral kepada beberapa instansi kunci, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Pilihan strategis ini didasarkan pada kondisi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan berskala luas dengan sistem desentralisasi daerah. Nilai tambah utama dari model kolaboratif ini adalah tingginya tingkat inklusivitas dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam memproduksi data demografi yang kaya di tingkat akar rumput (Bappenas, 2019). Dalam praktiknya, skema *collaborative governance* pada SDI dirancang untuk menjembatani interoperabilitas data sektoral agar tidak terjadi duplikasi fungsi, meskipun dalam tataran implementasi membutuhkan energi negosiasi yang jauh lebih besar (Nugroho & Rahmawati, 2023). Struktur kepemimpinan kolektif ini juga ditopang oleh legitimasi hukum yang kuat melalui proses legislasi Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI).

Analisis Risiko dan Efektifitas Institusional

Meskipun model sentralistik yang diterapkan oleh MAMPU Malaysia menjamin efisiensi birokrasi dan homogenitas infrastruktur, desain ini menyisakan kerentanan struktural yang signifikan. Ketergantungan yang tinggi pada otoritas tunggal menyebabkan keberlanjutan program digitalisasi sangat sensitif terhadap fluktuasi dan dinamika politik federal (Aziz, 2022). Secara teknis, pemusatan arsitektur data pada satu titik kontrol tunggal (*single point of control*) menciptakan risiko keamanan informasi berupa *single point of failure*. Zulkifli (2023) memperingatkan bahwa ketika seluruh simpul informasi bermuara pada satu pelayan pusat, maka satu celah keamanan siber yang berhasil ditembus akan berakibat pada kelumpuhan sistemik pelayanan publik federal secara instan.

Di sisi lain, kelemahan mendasar pada model kolaboratif Satu Data Indonesia terletak pada tingginya fragmentasi kelembagaan. Sifat kolektif-kolegial yang melibatkan banyak pemangku kepentingan sering kali memicu fenomena ego sektoral yang kronis antarinstansi. Ego sektoral ini memperlambat proses integrasi dan interkoneksi data nasional, seperti yang terlihat pada hambatan penyatuan Indeks Bhumandala dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE (Prasetyo & Nugroho, 2023). Akibatnya, upaya integrasi data sering kali berjalan secara sporadis dan kurang sinkron akibat resistensi antarlembaga yang cenderung protektif terhadap kepemilikan datanya masing-masing (Nugroho & Rahmawati, 2023).

Lebih lanjut, Indonesia dihadapkan pada tantangan disparitas digital geografis yang kontras antarwilayah serta sistem manajemen risiko siber yang masih terfragmentasi. Karakteristik pertahanan siber yang tersebar dan belum terstandardisasi secara seragam di setiap daerah atau instansi memperlebar celah kerentanan keamanan data nasional. Saputra dan Wijaya (2024) menegaskan bahwa ketiadaan standar tunggal dalam protokol keamanan siber daerah menyebabkan platform data terbuka di Indonesia rentan menjadi target eksploitasi peretas, karena kekuatan proteksi antar-instansi sangat timpang. Kesenjangan tata kelola risiko inilah yang membedakan Indonesia dengan Malaysia dalam sebuah realitas di mana Indonesia harus mengelola ancaman siber yang menyebar secara horizontal, sementara Malaysia menghadapi ancaman siber yang terpusat secara vertikal (Ramli & Rahman, 2024).

Secara kumulatif, perbandingan ini menunjukkan bahwa kecepatan eksekusi pada sistem sentralistik Malaysia harus dibayar dengan tingginya risiko keamanan siber terpusat. Sementara itu, luasnya partisipasi daerah pada sistem kolaboratif Indonesia menuntut konsekuensi berupa lambatnya integrasi akibat hambatan birokrasi lintas sektoral.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi komparatif ini menegaskan bahwa MAMPU Malaysia unggul mutlak dalam hal kecepatan eksekusi dan penyeragaman sistem berkat garis komando yang terpusat serta kejelasan target MD2030. Sebaliknya, Satu Data Indonesia memiliki nilai plus dalam melahirkan sistem tatakelola data yang lebih tangguh, demokratis, dan inklusif di tengah rumitnya sekat otonomi daerah. Terkait benteng pertahanan siber, kedua negara masih rapot merah, model terpusat Malaysia rentan terhadap risiko kelumpuhan total sistem secara instan, sedangkan model menyebar milik Indonesia rentan terhadap kebocoran data parsial akibat lemahnya standarisasi keamanan di level daerah.

Saran

1. Bagi Indonesia

Pemerintah pusat perlu mengadopsi ketegasan regulasi *top-down* milik MAMPU secara selektif. Lewat undang-undang SDI yang baru, Pemerintah harus berani memotong anggaran TIK daerah yang digunakan untuk membuat aplikasi baru di luar arsitektur PDN.

2. Bagi Malaysia

Model pengumpulan data terintegrasi milik Indonesia, kolaborasi SDI dengan sistem geospasial Bhumandala patut ditiru agar akurasi data di tingkat desa/kampung lebih akurat dengan melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal.

Ministrate, Vol. 8 No. 1: 81-91

Studi Perbandingan Digitalisasi Pelayanan Publik Antara Malaysian Administrative Modernisation And
Management Planning Unit (MAMPU) Dan Satu Data Indonesia

Lukman Efendi

Daftar Pustaka

BUKU

- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). Digital-Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government. Oxford: Oxford University Press.
- Haneem, F., Mustapa, M. N., & Kwon, H. Y. (2022). Building a Digital Government and Data-Driven Public Sector Innovation in the Post-COVID-19 Era for Malaysia. Kuala Lumpur: Khazanah Research Institute.

Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital*. pemerintah: Pre-Media.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (T. R. Rohidi, Penerjemah). UI Press.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading: Addison-Wesley.

JURNAL ILMIAH

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Aziz, A. A. (2022). Digital Transformation in Malaysia: Public Sector Modernization and Cyber Security Challenges. *Journal of Southeast Asian Public Policy*, 14(2), 115-132.

Bakar, K. A., Ibrahim, R., & Yunus, Y. (2022). Digital Government Evolution and Maturity Models: A Review. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(7), 41–48.

Mohamed, A., & Ali, F. H. B. (2025). The Evolution of E-Government in Malaysia: Institutional Structures and Public Paradigms. *Journal of Governance and Halal Studies*, 4(1), 12–25.

Mustafa, M., & Rahim, N. A. (2022). Implementation of Malaysia E-Government Information Leakage Model (MyEigle). *Journal of Advanced Research in Computing and Applications*, 26(1), 89–98.

Nugroho, Y., & Rahmawati, A. (2023). Collaborative Governance dalam Kebijakan Satu Data Indonesia: Integrasi dan Interoperabilitas Data Sektor. *Jurnal Tata Kelola Publik Indonesia*, 7(3), 210-225.

Prasetyo, B., & Nugroho, H. (2023). Hambatan Birokrasi dan Ego Sektor dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 45-62.

Ramli, M. Z., & Rahman, S. A. (2024). Centralization vs Decentralization in ASEAN Digital Governance: A Comparative Case Study of Malaysia and Indonesia. *Asian Review of Public Administration*, 36(1), 58-74.

Saputra, D., & Wijaya, C. (2024). Tantangan Manajemen Risiko Siber dan Infrastruktur Terfragmentasi pada Implementasi Kebijakan Data Terbuka. *Jurnal Keamanan Informasi Nasional*, 9(2), 142-159.

Suhardi, S., & Firmansyah, G. (2023). The Design of Indonesia e-Government (SPBE) Governance in Urban Areas. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 101(4), 1430–1442.

Zulkifli, M. F. (2023). Evaluating the Public Sector Digital Architecture of MAMPU: Efficiency, Bureaucracy, and Single Point of Failure Risks. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 8(4), 101-118.

DOKUMEN RESMI & REGULASI PEMERINTAH

Bappenas. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia: Menuju Tata Kelola Data yang Akurat dan Terintegrasi*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Ministrate, Vol. 8 No. 1: 81-91

Studi Perbandingan Digitalisasi Pelayanan Publik Antara Malaysian Administrative Modernisation And Management Planning Unit (MAMPU) Dan Satu Data Indonesia

Lukman Efendi

MAMPU. (2021). Malaysia Digital Economy Blueprint: MyDigital. Prime Minister's Department.

MyDIGITAL Corporation. (2021). Malaysia Digital Economy Blueprint. Putrajaya: Economic Planning Unit, Prime Minister's Department.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.